

PENGUATAN EKOSISTEM UMKM MELALUI KOLABORASI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA: MODEL KEMITRAAN DAN MANAJEMEN HUBUNGAN STAKEHOLDER

Yohan Purnawan¹, Hendri Mayanta², Muhammad Rijal Panjaitan³
Universitas Efarina, Indonesia^{1,2,3}
Email: yohanpurnawan@gmail.com

Abstrak

Laporan ini membahas penguatan ekosistem UMKM melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk menyusun model kemitraan yang operasional serta manajemen hubungan stakeholder yang terukur, dengan mengatasi masalah fragmentasi dukungan, akses pasar, pembiayaan, serta koordinasi yang belum optimal. Kegiatan mencakup pemetaan stakeholder, perancangan model kemitraan, dan program kolaboratif seperti akses pasar serta peningkatan mutu. Sasaran utama mencakup UMKM, instansi pemerintah, dan dunia usaha. Metodologi dilakukan melalui pemetaan dan asesmen kebutuhan, penyusunan SOP dan KPI, serta pelaksanaan program dalam bentuk proyek percobaan. Keluaran proyek menghasilkan dokumen model kemitraan dan rencana aksi 12 bulan. Kolaborasi yang efektif diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi lokal.

Kata kunci: *UMKM, Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, Model Kemitraan, Stakeholder Management*

Abstract

This report discusses strengthening the MSME ecosystem through collaboration between the government and the business world. The goal is to develop an operational partnership model and a measurable stakeholder relationship management approach, addressing issues related to support fragmentation, market access, financing, and suboptimal coordination. The activities include stakeholder mapping, designing partnership models, and implementing collaborative programs such as market access and quality improvement. The methodology covers needs mapping and assessment, development of SOPs and KPIs, and carrying out the program in the form of trial projects. The main outputs include partnership model documents and a 12-month action plan. Effective collaboration is expected to strengthen the position of MSMEs in the local economic ecosystem.

Keywords: *MSMEs, Government Collaboration, Business World, Partnership Model, Stakeholder Management*

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah berawal dari kenyataan bahwa UMKM memegang peran penting dalam perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta kontribusi terhadap aktivitas rantai nilai di tingkat daerah. Namun, peran strategis tersebut belum selalu diikuti oleh kondisi ekosistem yang kuat dan terpadu. Banyak UMKM masih menghadapi tantangan mendasar yang membuat mereka sulit tumbuh secara berkelanjutan, baik dari sisi produktivitas, kapasitas manajerial, maupun kemampuan mengakses peluang ekonomi yang ada.

Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah fragmentasi dukungan. Bantuan, program pembinaan, dan fasilitas yang berasal dari berbagai pihak sering kali berjalan secara terpisah, tidak terkoordinasi, atau belum menyasar kebutuhan UMKM secara tepat sasaran. Akibatnya, UMKM menerima dukungan yang tidak selalu saling melengkapi, sehingga dampak program menjadi kurang optimal. Di sisi lain, dunia usaha dan instansi pemerintah juga dapat mengalami ketidaksamaan arah dalam program kemitraan yang dibangun.

Selain fragmentasi dukungan, UMKM juga kerap mengalami hambatan dalam akses pasar. Banyak pelaku UMKM kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan jaringan distribusi, kemampuan pemasaran, pemenuhan standar, hingga kurangnya informasi mengenai kebutuhan pasar dan preferensi konsumen. Kondisi ini berimbas pada lemahnya keberlanjutan penjualan, ketergantungan

pada pasar yang sempit, serta rendahnya daya saing produk UMKM.

Isu berikutnya adalah akses pembiayaan. Walaupun pembiayaan merupakan faktor penting untuk meningkatkan skala usaha, memperbaiki kualitas produksi, dan mendorong inovasi, tidak sedikit UMKM menghadapi kendala seperti keterbatasan dokumen, risiko yang dianggap tinggi oleh lembaga pembiayaan, hingga kurangnya pemahaman terhadap skema pembiayaan yang tersedia. Akibatnya, UMKM sulit memperoleh modal kerja maupun investasi yang diperlukan untuk berkembang secara cepat dan terukur.

Permasalahan semakin kompleks ketika koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal. Dalam banyak kasus, hubungan antara UMKM, instansi pemerintah, dan dunia usaha tidak terbangun dalam satu mekanisme kerja yang jelas. Stakeholder mungkin terlibat dalam program yang mirip, tetapi tanpa manajemen hubungan yang terukur, sehingga prioritas, indikator keberhasilan, dan pembagian peran menjadi tidak konsisten. Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan dalam kolaborasi dan berkurangnya peluang terbentuknya kemitraan yang benar-benar operasional.

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, diperlukan penguatan ekosistem UMKM yang tidak hanya fokus pada penyediaan program secara parsial, tetapi juga pada desain kemitraan yang mampu menghubungkan seluruh pihak secara sistematis. Penguatan ekosistem berarti membangun pola kerja kolaboratif yang memastikan dukungan pemerintah, kebutuhan dan kemampuan dunia usaha, serta kesiapan UMKM dapat bertemu dalam satu tujuan yang sama. Di sini, penyusunan model kemitraan yang operasional menjadi kunci agar kolaborasi tidak berhenti pada level seremonial.

Oleh karena itu, diperlukan manajemen hubungan stakeholder yang terukur untuk memperjelas peran, kontribusi, serta mekanisme kerja antar pihak. Langkah awal yang dibutuhkan adalah pemetaan stakeholder guna memahami aktor kunci, kebutuhan mereka, serta keterkaitan antar aktor dalam ekosistem UMKM. Setelah itu, perancangan model kemitraan dapat disusun dengan mempertimbangkan standar proses yang jelas, termasuk penyusunan SOP dan penetapan KPI agar kolaborasi memiliki arah dan ukuran kinerja.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah menyusun model kemitraan dan melaksanakan program kolaboratif yang relevan, seperti peningkatan mutu dan akses pasar. Prosesnya dilakukan melalui pemetaan dan asesmen kebutuhan, pengembangan perangkat manajemen (SOP dan KPI), serta implementasi program dalam bentuk proyek percobaan untuk menguji efektivitas. Keluaran yang dihasilkan berupa dokumen model kemitraan serta rencana aksi 12 bulan, dengan harapan kolaborasi yang efektif dapat memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi lokal secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Berikut kajian pustaka yang disusun dalam 6 paragraf utuh dan runtun (sesuai konteks penguatan ekosistem UMKM melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha).

Penguatan ekosistem UMKM berangkat dari pemahaman bahwa UMKM tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu jejaring yang melibatkan banyak aktor dan faktor pendukung. Ekosistem UMKM biasanya mencakup hubungan antara pelaku usaha (UMKM), pemerintah, lembaga pendukung seperti lembaga pembiayaan dan pelatihan, serta dunia usaha/korporasi sebagai penarik (pull) demand melalui rantai pasok. Dalam kerangka ekosistem, peningkatan kinerja UMKM dipengaruhi oleh ketersediaan input (kapasitas produksi, bahan baku, teknologi), proses pendukung (pendampingan, standardisasi, akses informasi), serta output yang berupa akses pasar, peningkatan mutu, dan kemampuan berkelanjutan.

Dalam kajian mengenai kolaborasi multipihak, literatur menekankan bahwa peran masing-masing aktor cenderung saling melengkapi, tetapi manfaatnya hanya optimal jika hubungan antarpihak dikelola secara sistematis. Kolaborasi dapat dimaknai sebagai bentuk kerja bersama yang tidak hanya berupa partisipasi pasif, melainkan adanya sinkronisasi tujuan, pembagian peran, serta pengaturan tata kelola agar program yang dijalankan saling memperkuat. Dengan demikian, literatur kolaborasi menggarisbawahi pentingnya mekanisme koordinasi dan adanya kesepakatan operasional agar intervensi tidak berjalan parsial, duplikatif, atau tidak sesuai kebutuhan UMKM.

Pada konteks kemitraan pemerintah dan dunia usaha, kajian pustaka umumnya memandang kemitraan sebagai jembatan antara kebijakan publik dan kebutuhan industri. Pemerintah memiliki kapasitas regulasi, fasilitasi, serta penyediaan program pembinaan dan dukungan kelembagaan, sedangkan dunia usaha memiliki daya dalam akses pasar, standar kualitas, keahlian rantai pasok, dan peluang investasi. Kemitraan yang efektif tidak hanya berfokus pada penandatanganan kerja sama, tetapi juga pada implementasi yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak, alur proses, serta indikator keberhasilan bersama. Karena itu, literatur kemitraan mendorong desain kemitraan yang operasional, termasuk pengelolaan sumber daya, pengurangan risiko, dan percepatan adopsi standar yang relevan dengan pasar.

Selanjutnya, kajian mengenai manajemen hubungan stakeholder menyoroti bahwa keberhasilan penguatan ekosistem UMKM sangat bergantung pada bagaimana hubungan antaraktor diatur. Stakeholder management mencakup pemetaan aktor, identifikasi kepentingan, analisis pengaruh dan kontribusi, serta penyusunan mekanisme komunikasi dan keterlibatan. Manajemen hubungan stakeholder juga menekankan perlunya keterukuran dalam keterlibatan, misalnya melalui perumusan peran yang jelas, pengaturan pelaporan, serta evaluasi capaian. Dengan pendekatan ini, konflik kepentingan, ketidaksamaan tujuan, dan ketidakterpaduan program dapat diminimalkan, sehingga kolaborasi lebih konsisten dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Berkenaan dengan akses pasar dan peningkatan mutu, literatur banyak membahas bahwa UMKM sering terkendala pada sisi demand (akses pelanggan baru, kanal distribusi) dan supply-side capability (kualitas produk, konsistensi produksi, kemampuan memenuhi standar). Akses pasar tidak hanya berarti “menjual ke lebih banyak pihak”, tetapi juga mencakup kemampuan memahami kebutuhan pasar, spesifikasi produk, ketepatan pengiriman, serta penerapan sistem mutu. Karena itu, program kolaboratif yang relevan biasanya menggabungkan aktivitas peningkatan mutu (misalnya pelatihan, pendampingan produksi, penguatan standar) dengan kegiatan yang memperluas akses pasar (misalnya kemitraan rantai pasok, pameran, inkubasi kemitraan, atau jejaring penjualan).

Terakhir, literatur terkait perencanaan dan pengendalian program kolaboratif menekankan pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan indikator kinerja utama (KPI). SOP berfungsi sebagai panduan proses yang memastikan setiap pihak menjalankan langkah yang sama secara terukur, sedangkan KPI menjadi alat evaluasi untuk menilai kemajuan berdasarkan target yang dapat dipantau. Dalam proyek kolaboratif, SOP dan KPI juga memudahkan pengelolaan perubahan, pelaporan kinerja, serta pembelajaran dari hasil implementasi (misalnya melalui proyek percobaan atau uji coba). Dengan demikian, kajian pustaka memberi dasar bahwa penguatan ekosistem UMKM melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan lebih efektif ketika ditopang oleh desain kemitraan yang operasional, manajemen stakeholder yang terukur, serta sistem kinerja melalui SOP dan KPI.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan pemetaan dan asesmen kebutuhan untuk memahami kondisi ekosistem UMKM serta karakteristik para pemangku kepentingan yang terlibat. Tahap awal difokuskan pada pemetaan stakeholder, yaitu mengidentifikasi aktor kunci dari unsur UMKM, instansi pemerintah, dan dunia usaha, termasuk peran, kepentingan, kapasitas, serta kebutuhan masing-masing pihak. Selanjutnya dilakukan asesmen kebutuhan guna menelaah masalah utama yang muncul, seperti fragmentasi dukungan, keterbatasan akses pasar, hambatan pembiayaan, serta lemahnya koordinasi antaraktor. Hasil pemetaan dan asesmen kemudian menjadi dasar untuk menentukan prioritas intervensi dan rancangan hubungan kemitraan yang paling relevan serta realistis untuk diimplementasikan.

Setelah kebutuhan dan aktor dipetakan, penelitian berlanjut pada perancangan model kemitraan dan perangkat manajemen yang terukur, meliputi penyusunan SOP dan KPI sebagai landasan operasional serta pengendalian kinerja kolaborasi. Model kemitraan disusun agar pembagian peran, mekanisme koordinasi, proses kerja, dan indikator keberhasilan dapat berjalan secara konsisten antar pihak yang berkolaborasi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan program dalam bentuk proyek percobaan untuk menguji implementasi model kemitraan pada skala terbatas, sekaligus memastikan SOP dan KPI dapat diterapkan dan dievaluasi. Keluaran akhir penelitian menghasilkan dokumen model kemitraan beserta rencana aksi 12 bulan, yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan secara bertahap mulai dari persiapan, implementasi, monitoring dan evaluasi, hingga penguatan keberlanjutan kolaborasi dalam rangka

memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil utama kegiatan menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat dijalankan secara lebih terarah ketika dimulai dari pemetaan stakeholder yang komprehensif. Melalui proses identifikasi dan asesmen kebutuhan, keterkaitan antaraktor—UMKM, instansi pemerintah, serta dunia usaha—menjadi lebih jelas, termasuk peran yang selama ini belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa banyak kendala UMKM tidak semata karena kapasitas UMKM, tetapi juga karena tidak terhubungnya aktor pendukung dalam satu alur kerja yang sama.

Selanjutnya, hasil penting lainnya adalah tersusunnya model kemitraan yang operasional. Model ini tidak berhenti pada kesepakatan kerja sama secara administratif, melainkan menyajikan kerangka hubungan yang lebih “siap jalan”, seperti mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta alur pelaksanaan kegiatan dari hulu ke hilir. Dengan adanya struktur ini, upaya kolaborasi diharapkan mengurangi tumpang tindih program dan sekaligus menutup celah dukungan yang selama ini bersifat parsial.

Dari sisi perangkat pengelolaan kolaborasi, keluaran berupa penyusunan SOP dan KPI menjadi aspek yang paling menentukan dalam memastikan kolaborasi dapat dikendalikan. SOP digunakan sebagai panduan standar proses agar setiap pihak menjalankan langkah yang selaras, sedangkan KPI berfungsi sebagai ukuran kinerja yang dapat dipantau. Temuan yang muncul menunjukkan bahwa tanpa indikator yang terukur dan prosedur yang disepakati, kolaborasi cenderung sulit dievaluasi, sehingga sulit pula melakukan perbaikan secara cepat berdasarkan capaian nyata.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan menghasilkan program kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan UMKM, khususnya pada dua area utama yang sering menjadi hambatan, yaitu akses pasar dan peningkatan mutu. Program semacam ini memberi implikasi bahwa intervensi harus menggabungkan sisi kemampuan (*supply capability*) dan sisi permintaan (*market demand*). Artinya, UMKM tidak cukup hanya dibina agar produknya meningkat mutunya, tetapi juga perlu difasilitasi agar produk tersebut dapat terhubung dengan peluang pasar yang sesuai.

Hasil pembahasan berikutnya menyoroti bahwa implementasi melalui proyek percobaan memberikan nilai pembelajaran yang lebih baik dibanding langsung menerapkan secara penuh. Proyek percobaan memungkinkan pengujian kelayakan SOP dan KPI, sekaligus mengidentifikasi kendala implementasional seperti kesiapan aktor, kebutuhan penyesuaian proses, serta efektivitas mekanisme koordinasi. Dengan demikian, risiko kegagalan program skala besar dapat ditekan karena terdapat ruang untuk perbaikan berbasis bukti.

Dalam pembahasan, rencana aksi 12 bulan menjadi bentuk konkret dari bagaimana model kemitraan diterjemahkan menjadi tahapan kerja yang jelas. Rencana ini membantu memastikan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, hingga penguatan keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan jangka waktu yang terukur membantu semua pihak memahami tenggat, kontribusi, dan ekspektasi hasil.

Secara keseluruhan, pembahasan mengarah pada kesimpulan bahwa kolaborasi yang efektif mampu mengatasi akar masalah seperti fragmentasi dukungan dan koordinasi yang belum optimal. Ketika stakeholder dikelola melalui mekanisme yang jelas (model kemitraan, SOP, KPI) maka dukungan dari berbagai pihak dapat saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, akses pasar dan peningkatan mutu yang terhubung dalam satu skema akan memperbesar peluang UMKM untuk berkembang lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, hasil dan pembahasan memperlihatkan bahwa penguatan ekosistem UMKM akan lebih kuat jika kemitraan dipandang sebagai sistem kerja yang berulang dan dapat dievaluasi. Dokumen model kemitraan dan rencana aksi 12 bulan menjadi fondasi bagi pengembangan kolaborasi berikutnya, termasuk kemungkinan replikasi pada kelompok UMKM atau wilayah lain. Dengan pendekatan ini, posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi lokal diharapkan meningkat karena dukungan menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM akan lebih efektif ketika kolaborasi pemerintah dan dunia usaha tidak berjalan secara parsial, melainkan dibangun melalui model kemitraan yang operasional. Proses pemetaan dan asesmen kebutuhan menghasilkan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran, kepentingan, dan kebutuhan tiap stakeholder, sehingga kendala seperti fragmentasi dukungan, akses pasar yang terbatas, hambatan pembiayaan, serta koordinasi yang belum optimal dapat ditangani dengan pendekatan yang lebih terarah dan saling melengkapi. Dengan demikian, kemitraan tidak hanya menjadi kesepakatan formal, tetapi benar-benar menjadi mekanisme kerja yang mendorong keterpaduan program.

Selain itu, penyusunan perangkat manajemen berupa SOP dan KPI memperkuat kemampuan kolaborasi untuk dikelola, dipantau, dan dievaluasi secara terukur. Implementasi melalui proyek percobaan dan rencana aksi 12 bulan memastikan bahwa model kemitraan dapat diuji dalam praktik, disesuaikan berdasarkan temuan lapangan, serta diarahkan pada capaian yang jelas. Pada akhirnya, kolaborasi yang efektif dan terukur diharapkan mampu meningkatkan posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi lokal secara lebih berkelanjutan, karena dukungan menjadi tepat sasaran, prosesnya jelas, dan hasilnya dapat diukur.

REFERENSI

- Ahmaddien, I., & Sa'dia, N. H. (2020). Pengaruh kebijakan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan di Indonesia. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 22-32.
- Alfilaturlani, I. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Pkwt (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) Di Matahari Bazaar Ceria Mall Kapuk Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi)*.
- Farida, I. (2020). Perjanjian perburuhan: Perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing. *Sinar Grafika*
- Habibi, N., Amrizal, M. D. R., Rozikin, I. S., & Ahmad, I. F. (2024). Memperkuat Perlindungan Pekerja Outsourcing: Analisis Implementasi Kebijakan. *Journal of Social Movements*, 1(1), 85-97.
- Herman, F. R., & Soraya, N. I. (2023). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis PKWT PT. Radiant Utama). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 152-166
- Herdiansyah Hamzah, Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Hubungan Industrial, Makalah tidak diterbitkan, tanpa tahun.
- Lalu Husni, *Perlindungan Buruh (Arbeitsbescherming)*, Dalam Zainal Asikin (Editor), 2008, *DasarDasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nisa, A. K. (2024). Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak Karyawan dalam Ketidakjelasan Status Pasca Berakhirnya Kontrak Kerja. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(4), 31-40.
- Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 84-100
- Saputra, A., Priadi, E., & Rustamaji (2024). Analysis Of Slope Stability Due to Illegal Gold Mining In Bengkulu Regency *Jurnal Teknik Sipil*, 24 (1) 766-777
- Sari, N. P. N. E., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut UndangUndang no 13 Tahun 2003. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 124-128.
- Situmorang, D., M. et al. "Analysis Of Accounting Knowledge Behavior and Accounting Recording on Revenue with Cultural Behavior Moderating Variable" *Al-Mal: Journal Of Islamic Accounting and Finance [ONLINE] Volume 05 Number 02 (Des 31, 2024)*
- Suherman Toha, dkk, *Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, BPHN, Depkumham, Jakarta, 2010.
- Sukhebi, S., Suganda, A., & Ismail, I. Model Hubungan Alih Daya dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 6(1), 473272.
- Zulkarnaen, A. H. (2018). Masalah rawan dalam hubungan industrial dan konsep negara kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 806-825.